

Kemerdekaan Petani dan Keberlanjutan Kehidupan

Sebastian Saragih, Sustainable Livelihood Coordinator OXFAM GB/Indonesia Office.

Apa yang kita lihat sekarang ini adalah kehadiran sebuah sistem pangan yang totaliter, dimana perusahaan besar mengontrol seluruh mata rantai pangan dan menghancurkan seluruh alternative. Rakyat kemudian tidak punya akses untuk menganekaragamkan, menyelamatkan dan memproduksi pangan secara berkelanjutan. Monopoli bibit dan sistem pangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar telah menghancurkan pasar dan sistem pangan lokal. Oleh sebab itu kita harus berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hak menyelamatkan bibit dan keanekaragaman hayati. Kita harus mendapatkan kembali hak-hak untuk melindungi bumi berikut keanekaragaman hayatinya. Monopoli, penjajahan, pencurian dan kemudian pematenan kearifan lokal serta pengrusakan yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut harus kita hentikan. Demokrasi pangan adalah agenda baru bagi perjuangan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Demokrasi pangan adalah agenda baru bagi perjuangan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologi (Vandana Shiva, 2000. Stolen Harvest)

Fenomena terburuk yang dihasilkan oleh revolusi hijau atau sering disebut dengan intensifikasi pertanian adalah rusaknya kebudayaan manusia yang mengagungkan nilai-nilai kehidupan yang harmoni. Hubungan manusia dengan alam maupun dengan sesama manusia lebih berkembang ke arah eksploitatif yang kemudian keguncangan-keguncangan yang mengancam keberlanjutan kehidupan itu sendiri.

Revolusi hijau di Indonesia dimulai pada tanaman padi kemudian berkembang pada komoditas lain termasuk ternak. Unsur utama dari revolusi hijau adalah seperangkat teknologi baru yang terdiri dari bibit hibrida, pestisida, pupuk NPK, hormon pertumbuhan dan irigasi. Unsur pendukungnya adalah paket kredit dan subsidi untuk pengadaan teknologi. Sebagai unsur pendorongnya adalah penyuluh pertanian, peneliti dan perguruan tinggi.

Seluruh unsur ini pada awalnya dipahami seolah-olah didapatkan secara gratis. Pemerintah pada era itu, disebut sebagai "bantuan". Namun kita menjadi tahu bahwa itu semua didapatkan pemerintah dari dana pinjaman berbunga atau yang disebut hutang luar negeri. Diyakini bahwa hutang inilah yang menjadi pendorong terjadinya resesi ekonomi, sulitnya kebangkitan ekonomi Indonesia, serta tidak mandirinya pemerintah dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. Kebijakan pemerintah menjadi sangat mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan negara/lembaga pemberi hutang.

Menurut Binny Buchori, Total hutang Indonesia kurang lebih US\$150 milyar atau 100% dari PDB (pendapatan kotor nasional). Data dari Bank Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia harus membayar hutang sebesar US\$7.5 milyar pada tahun 2001 dan tahun-tahun berikutnya sebesar US\$ 10,97; US\$9,32; US\$ 8,3 dan US\$ 8.2 milyar. Melihat begitu besar beban hutangnya maka Indonesia pasti tidak mampu membayar hutangnya dan tetap tergantung kepada hutang. (TEMPO, 14 Oktober 2001).

Hubungan antara hutang dan proses penjajahan baru menggunakan teknologi revolusi hijau dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut: pertama, negara penemu revolusi hijau meyakinkan kepada pemerintah bahwa revolusi hijau akan meningkatkan produksi secara "revoluasioner". Kedua, negara pemilik modal (uang) menawarkan paket bantuan agar proses intensifikasi dapat berjalan. Ternyata bantuan ini tidak gratis. Studi yang dilakukan Oxfam menunjukkan bahwa dari setiap US\$1 bantuan yang diberikan, akan diambil lagi kira-kira sebesar US\$2 akibat syarat-syarat yang diberlakukan atas "bantuan" tersebut. Bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan pertanian misalnya, akan diikuti dengan bentuk konsultasi, training dan monopoli suku cadang oleh negara pemberi "bantuan" yang nilai bisa mencapai dua kali lipat dari jumlah bantuan tersebut. Kegiatan ikutan tersebut harus dibiayai oleh negara (baca:rakyat) penerima "bantuan".

Petani adalah korban utama dan terutama dari proses intensifikasi pertanian. Petani dieksploitasi untuk mengeksploitasi alam melalui pesan-pesan pembangunan pertanian dengan iming-iming

peningkatan produksi. Ukuran yang dipakai untuk mengukur keberhasilan pertanian berubah dari kecukupan pangan dan kesejahteraan petani menjadi besarnya produksi.

Teknologi intensifikasi pertanian diperkenalkan kepada petani melalui janji-janji peningkatan produksi. Asumsi yang dipakai, dengan peningkatan jumlah produksi maka akan terjadi peningkatan pendapatan yang kemudian akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan. Upaya memperkenalkan teknologi ini kepada petani tidak hanya melalui proses-proses pengenalan yang bersahabat, melainkan juga dilakukan dengan paksaan dan jebakan. Hasilnya, seperti yang kita rasakan, petani terperangkap ke dalam kepercayaan-kepercayaan baru yang dikembangkan oleh revolusi hijau.

Pertama, petani terperangkap dalam teknologi yang tidak bisa ia ciptakan sendiri. Petani hanya menjadi pemakai, sedangkan nilai tukar dari apa yang diproduksi terhadap teknologi yang dipakai merosot terus-menerus. Misalnya: nilai tukar hasil pertanian terhadap benih hibrida, mesin pertanian, pestisida dan sebagainya cenderung turun terus. Dari tahun ke tahun perbandingan harga pupuk, pestisida, bibit hibrida per satuan dengan produk pertanian misalnya padi, jagung dan sebagainya sangat tidak seimbang. Kalau dulu harga 1 kg padi sama dengan 5 kg pupuk maka sekarang 1 kg padi hampir sama dengan 1 kg pupuk.

Untuk keluar dari ketergantungan teknologi ini adalah sesuatu yang sangat berat karena infrastruktur (bangunan fisik seperti sistem pertanian, ketersediaan sarana produksi dan sebagainya) serta suprastruktur (keorganisasian, penyuluhan) yang dibangun memang merupakan perangkat yang sangat kuat.

Demikian besar pengaruh "pencipta" teknologi ini bisa mengubah peradaban dunia begitu cepatnya sehingga disebut "revolusi". "Para pencipta" itu adalah perusahaan-perusahaan besar atau disebut dengan Trans National Corporates (TNCs) seperti MOSANTO, CARGIL, dan sebagainya. Mereka menguasai perdagangan teknologi ini. Studi Oxfam menunjukkan bahwa enam perusahaan besar mengontrol 70% dari pasar pertanian intensif. Vandana Shiva melaporkan bahwa hanya sepuluh perusahaan yang menguasai 32% pasar bibit dunia, dan mereka menguasai 100% pasar bibit transgenik.

Perusahaan-perusahaan ini secara aktif mempengaruhi proses pembuatan kesepakatan-kesepakatan multilateral maupun bilateral. Proses monopolistik itu secara jelas masuk melalui program IMF atau yang dikenal dengan SAP (Structural Adjustment Programme) yang di Indonesia dikenal dengan Lol (Letter of Intent)

Perusahaan-perusahaan ini mengaku menciptakan teknologi tersebut tetapi sebenarnya mereka hanyalah mengembangkan dan mematenkan apa yang sudah terlebih dahulu dikembangkan oleh petani secara turun-temurun.

Kedua, petani terperangkap dalam mekanisme pasar produk/output karena petani tidak mempunyai posisi tawar sama sekali. Petani hanya memproduksi dan seringkali hal tersebut lebih dipengaruhi oleh "janji-janji manis" harga yang tinggi dari komoditas yang ditanamnya. Petani tidak lagi bertani untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan lingkungannya melainkan mengejar "mimpi palsu" harga tinggi dari pasar komoditas. Mimpi harga yang tinggi hanyalah sebuah perangkat petani. Harga yang adil (menguntungkan petani) yang tidak pernah tercipta. Pasar dimonopoli oleh pengusaha besar.

Bagi petani, pada hakekatnya bertani (berbudidaya) adalah ritual kehidupan untuk berkreasi dan berkarya yang dipenuhi semangat, nilai-nilai yang berlandaskan pada kepercayaan terhadap kemuliaan alam dan penciptanya. Begitu banyak doa dipanjatkan menyertai setiap tahapan dari proses produksi, tetapi secara sistematis nilai-nilai itu disingkirkan dari dunia pertanian.

Revolusi hijau menjadikan bertani itu sekedar proses memproduksi atau menghasilkan barang. Kepercayaan ini kemudian menjadi arus utama dan menyingkirkan segala macam ritual kehidupan dalam dunia petani. Berbudidaya berubah menjadi ber-usaha tani. budi, daya dan budaya hilang dari dunia pertanian.

Arus ini juga masuk ke konsumen yang semakin tidak peduli bagaimana sebuah produk

pertanian atau pangan dihasilkan. Konsumen tidak peduli apakah ketika memproduksi telah terjadi eksploitasi manusia dan alam sebesar-besarnya. Konsumen tidak merasa tidak bermoral mengkonsumsi produk pertanian yang dijual oleh petani dengan linangan air mata. Ketika musim panen tiba harga jual jatuh namun tetap harus dijual karena petani tidak punya lagi tempat untuk menyimpan. Lumbung sudah lama hilang karena pemerintah telah mengambilalih peran penyimpanan produksi pertanian melalui BULOG. Asumsi yang menyatakan bahwa peningkatan produksi pertanian akan membawa peningkatan pendapatan dan selanjutnya kesejahteraan petani ternyata hanyalah janji palsu.

Konsumen kemudian menjadi korban kedua, karena diperangkap dalam situasi tidak bisa memilih. Konsumen ditempatkan hanya sebagai orang yang mengkonsumsi dan diblokir secara sistematis seluruh keingintahuannya terhadap proses memproduksi. Hubungan-hubungan harmoni yang semula dibangun antara petani dan konsumen hilang begitu saja.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemakaian bahan kimia sintetis di sektor pertanian (berupa pupuk, pestisida dan hormon) berdampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan. WHO (World Health Organization) melaporkan bahwa setiap tahun sekitar 3 juta orang teracuni pestisida. Kira-kira 200 ribu orang kemudian meninggal dunia. Bahan kimia sintetis tersebut juga diyakini menjadi faktor utama yang mengakibatkan berkembangnya penyakit-penyakit yang mengganggu metabolisme seperti ginjal, lever, paru-paru dan sebagainya.

Alasan kesehatan ini kemudian mendorong konsumen untuk mulai mencari produk pertanian organis. dikalangan konsumen belakangan ini telah lahir kesadaran akan bahaya produk pertanian revolusi hijau, khususnya dampak langsung terhadap kesehatan atau pun dampak tidak langsung melalui pencemaran lingkungan. Konsumen mulai mencari produk pertanian organis.

Ketakutan konsumen terhadap bahan kimia sintetis, dan kesadaran akan kesehatan direspon oleh banyak kalangan sebagai sebuah peluang bisnis. Dibeberapa tempat situasi ini justru mengakibatkan kerusakan hutan, melanjutkan tradisi hubungan yang tidak harmonis antara petani dan konsumen, dan melahirkan perangkap baru. Untuk memenuhi kriteria organis maka hutan dibuka atau diambil humusnya. Terjadi apa yang disebut dengan "ecological dumping". Adapula yang disebut dengan "social dumping" yaitu harga produk pertanian organis lebih mahal maka petani menjual produk organisnya dan membeli produk revolusi hijau sebagai konsumen sehari-hari. Petani menjadi "hamba" untuk pemenuhan kesehatan konsumen.

Permintaan besar terhadap produk pertanian organis/sehat melahirkan inspirasi baru. Para pengusaha besar mulai mengembangkan bibit transgenik, pestisida organik, pupuk organik dan sebagainya. Ini semua merupakan proses tahap kedua dari intensifikasi pertanian dan juga pengembangan "pertanian organik". Inilah yang sering disebut sebagai Revolusi Hijau Tahap II dengan proses-proses yang membahayakan dan memerangkap jika tidak disikapi dengan gagah berani.

Pengalaman-pengalaman petani yang mengikuti pertemuan petani organis se Jawa yang menulis buku "Belajar dari Petani" membuktikan bahwa pertanian organis telah berhasil mendorong petani yang semula terperangkap dalam ketergantungan, kembali mampu berkreasi menciptakan teknologi lokal yang bersahabat dengan alam dan berbasis sumber daya lokal. Begitu beraneka ragam teknik atau cara mengelola pertanian yang secara terus menerus dikembangkan oleh petani atau cara tersebut terus diperbaiki sesuai dengan persoalan yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya lokal.

Untuk semua temuan-temuannya tersebut, saya yakin petani tidak berkeinginan mendapat pengesahan dari "pakar" yang seringkali menjadi hakim untuk menentukan apakah suatu temuan dapat disebut ilmiah atau tidak, dan juga tidak ada keinginan mem-patenkan- temuan-temuan tersebut. Keinginan untuk membagi pengalaman melalui penerbitan buku Belajar dari Petani, Kumpulan Pengalaman Bertani Organik menjadi bukti bahwa petani tidak merasa apa yang dihasilkannya harus menjadi milik pribadi melalui pematenan. Ini adalah bentuk perlawanan

petani atas lahirnya rezim patenisasi yang dimotori oleh WTO (World Trade Organization) melalui apa yang disebut dengan TRIPS (Trade related on Intellectual Property Rights).

Penerbitan buku tsb juga menjadi media bagi petani organis untuk memperkenalkan proses dan nilai-nilai yang dianutnya. Memberikan pilihan-pilihan produk berikut proses serta nilai-nilai dalam upaya menghasilkan produk pertanian organis kepada para konsumen. Berbagai informasi itu tidak ada di dalam industri pertanian yang hanya berorientasi produksi.

Pengenalan nilai-nilai itu juga berpotensi membangun solidaritas yang lebih konkret antara petani organis dengan konsumen. Konsumen yang merasa penting adanya produk pertanian yang dihasilkan secara tulus, yang melepas hubungan-hubungan yang tidak beradab antara manusia dan antar manusia dengan lingkungannya.

Seharusnya petani yang memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan dan keberlanjutan kehidupan ditinggikan oleh manusia lain yang tergantung dari hasil kerja petani tersebut.

Merdeka!!!!

Tulisan ini merupakan pengantar Buku Belajar dari Petani, Kumpulan Pengalaman Bertani Organik yang diterbitkan oleh STPN HPS Yogyakarta, 2003.